

**SEMESTER II , 2025 (Audited)**



**BPMSPH**

**Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi  
Produk Hewan**

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI  
KUASA PENGGUNA**



**ANGGARAN BA.018  
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2025 (AUDITED)**

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Bogor, 06 Mei 2026

Kepala Balai,



Dth. Dinar Hadi Wahyu Hartawan, M.Sc

NIP. 19810327200604 1 001

## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

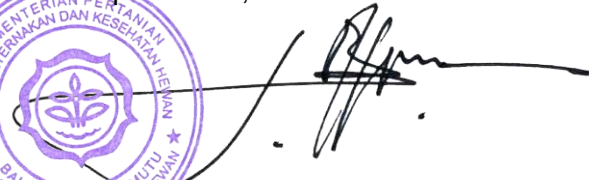
Laporan Keuangan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bogor, 06 Mei 2026

Kepala Balai,



  
Drh. Dinar Hadi Wahyu Hartawan, M.Sc  
NIP. 19810327200604 1 00

## DAFTAR ISI



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
Kata Pengantar	
Representasi Manajemen	
Pernyataan Tanggung Jawab	
Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
Ringkasan Laporan Keuangan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	8
V. Catatan atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	9
B. Penjelasan atas Pos Pos Laporan Realisasi Anggaran	34
C. Penjelasan atas Pos Pos Neraca	51
D. Penjelasan atas Pos Pos Laporan Operasional	95
E. Penjelasan atas Pos Pos Laporan Perubahan Ekuitas	104
F. Pengungkapan Penting Lainnya	120
VI. Lampiran	

## DAFTAR TABEL



## DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel A.2.1	Anggaran dan Jumlah Satuan Kerja Tahun 2025	12
Tabel A.2.2	Rincian Satuan Kerja (Satker) Kementerian Pertanian TA 2025	12
Tabel A.2.3	Anggaran dan Realisasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun 2025	13
Tabel B.1	Anggaran dan Realisasi PNPB TA 2025	34
Tabel B.1.1	Anggaran dan Realisasi Pendapatan BLU TA 2025	34
Tabel B.1.2.1	Anggaran dan Realisasi PNPB Lainnya TA 2025	35
Tabel B.1.2.2	Realisasi Pendapatan Lain-lain TA 2025	38
Tabel B.2.1	Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025	40
Tabel B.2.2	Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025 Berdasarkan Program	40
Tabel B.2.1.1	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2025	41
Tabel B.2.1.2	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 Berdasarkan Eselon I	41
Tabel B.2.2.1	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2025 Berdasarkan Jenis	42
Tabel B.2.2.2	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2025 Berdasarkan Jenis Yang Menghasilkan Barang Persediaan	42
Tabel B.2.2.3	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Berdasarkan Eselon I	
Tabel B.2.2.4	Alokasi Belanja 526 Barang dan Uang per Eselon 1	43
Tabel B.2.2.5	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Pemerintah Ditjen TP	43
Tabel B.2.2.6	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Pemerintah Ditjen Horti	44
Tabel B.2.2.7	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Pemerintah Ditjen Bun	44
Tabel B.2.2.8	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Pemerintah Ditjen PKH	45
Tabel B.2.2.9	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Pemerintah Ditjen PSP	45
Tabel B.2.2.10	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Pemerintah BPPSDMP	46
Tabel B.2.3.1	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2025	46
Tabel B.2.3.2	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Berdasarkan Eselon I	47
Tabel B.2.3.3	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025	47
Tabel B.2.3.4	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Berdasarkan Eselon I	47

Tabel B.2.3.5	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025	48
Tabel B.2.3.6	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Berdasarkan Eselon I	48
Tabel B.2.3.7	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan. Irigasi. Jaringan TA 2025	49
Tabel B.2.3.8	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan. Irigasi. Jaringan Berdasarkan Eselon I	49
Tabel B.2.3.9	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2025	50
Tabel B.2.3.10	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Lainnya Berdasarkan Eselon I	50
Tabel B.2.3.11	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal BLU TA 2025	50
Tabel C.1	Saldo Aset Per 31 Desember 2025 dan 2024	51
Tabel C.2	Saldo Aset Lancar Per 31 Desember 2025 dan 2024	51
Tabel C.1.1	Saldo Kas Di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024	52
Tabel C.3.1	Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 2024	53
Tabel C.3.2	Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran – PSEKPP per 31 Desember 2025	54
Tabel C.4.1	Saldo Kas pada BLU per 31 Desember 2025 dan 2024	58
Tabel C.4.2	Mutasi Tambah dan Kurang Kas pada BLU	58
Tabel C.5.1	Saldo Investasi Jangka Pendek – BLU per 31 Desember 2025 dan 2024	59
Tabel C.5.2	Rekening Deposito Satker BLU Pusvetma Surabaya	59
Tabel C.5.3	Rekening Deposito Satker BLU BIB Lembang	59
Tabel C.5.4	Rekening Deposito Satker BLU BBIB Singosari	59
Tabel C.6.1	Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024	60
Tabel C.6.2	Perhitungan Saldo Belanja Dibayar Dimuka – Setjen per 31 Desember 2025 Seharusnya	60
Tabel C.6.3	Saldo Belanja Dibayar Dimuka - Ditjen PSP per 31 Desember 2025	61
Tabel C.6.4	Rincian Mutasi Kurang Saldo Belanja Dibayar Dimuka Tahun 2025 Berdasarkan Hasil Reviu Itjen	62
Tabel C.7.1	Saldo Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2025 dan 2024	64
Tabel C.8.1	Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 2024	64
Tabel C.9.1	Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2025 dan 2024	66
Tabel C.10.1	Saldo Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per 31 Desember 2025 dan 2024	66
Tabel C.11.1	Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2025 dan 2024	67
Tabel C.12.1	Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024	67

Tabel C.12.2	Rekap Barang Persediaan yang Tidak dikuasai per 31 Desember2025	69
Tabel C.12.3	Rekap Barang Persediaan yang Tidak dikuasai pada Ditjen TP per 31 Desember2025	69
Tabel C.3	Rincian Aset Tetap per 31 Desember2025 dan 2024	71
Tabel C.4	Rincian BMN Belum Dialihkan Status dari Kementerian Pertanian ke Barantin	71
Tabel C.13.1	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Tanah	72
Tabel C.13.2	Rincian Tanah Berdasarkan Eselon I	73
Tabel C.13.3	Rekap Aset Tetap Tanah Belum Bersertifikat	73
Tabel C.14.1	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Peralatan dan Mesin	74
Tabel C.14.2	Rincian Peralatan dan Mesin berdasarkan Eselon I	76
Tabel C.15.1	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Gedung dan Bangunan	77
Tabel C.15.2	Rincian Gedung dan Bangunan per Eselon I	79
Tabel C.16.1	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Jalan Irigasi dan Jaringan	79
Tabel C.16.2	Rincian Jalan. Irigasi dan Jaringan berdasarkan Eselon I	80
Tabel C.17.1	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Aset Tetap Lainnya	81
Tabel C.17.2	Rincian Jalan. Irigasi dan Jaringan berdasarkan Eselon I	82
Tabel C.18.1	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan	82
Tabel C.19.1	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember2025 dan 2024	83
Tabel C.20.1	Saldo Properti Investasi per 31 Desember2025 dan 2024	83
Tabel C.21.1	Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember2025 dan 2024	85
Tabel C.5	Saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember2025 dan 2024	85
Tabel C.22.1	Saldo Tagihan TGR per 31 Desember2025 dan 2024	86
Tabel C.23.1	Saldo Tagihan TP/TG per 31 Desember2025 dan 2024	86
Tabel C.6	Rincian Saldo Aset Lainnya Per 31 Desember2025 dan 2024	87
Tabel C.26.1	Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember2025 dan 2024	87
Tabel C.26.2	Perbandingan Rincian Aset Tak Berwujud per Jenis Aset	88
Tabel C.27.1	Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember2025 dan 2024	89
Tabel C.28.1	Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember2025 dan 2024	90
Tabel C.29.1	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB	91
Tabel C.7	Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember2025 dan 2024	92
Tabel C.31.1	Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember2025 dan 2024	92
Tabel C.31.1	Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember2025 dan 2024	94

Tabel D.1	Kegiatan Operasional Kementerian Pertanian Tahun 2025 dan 2024	95
Tabel D.1.1	Pendapatan BLU Tahun 2025 dan 2024	95
Tabel D.1.2	Perbandingan Pendapatan BLU Tahun 2025 di LRA dengan LO	96
Tabel D.3.1.1	Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024	97
Tabel D.3.1.2	Perbandingan Belanja dan Beban Pegawai Tahun 2025 di LRA dengan LO	97
Tabel D.8.1	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024	98
Tabel D.8.2	Perbandingan Belanja/Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 di LRA dengan LO	98
Tabel D.9.1	Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024	99
Tabel D.10.1	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2025 dan 2024	100
Tabel D.2	Kegiatan Non Operasional Kementerian Pertanian Tahun 2025 dan 2024	100
Tabel D.13.1	Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025	101
Tabel D.14.1	Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025	103
Tabel E.3.1.1	Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Nilai Persediaan Tahun 2025	104
Tabel E.3.2.1	Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Reklasifikasi Tahun 2025	106
Tabel E.3.3.1	Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Nilai Aset Non Revaluasi Tahun 2025	109
Tabel E.3.4.1	Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Lain-Lain Tahun 2025	113
Tabel E.4.5.1	Pengesahan Hibah Langsung Tahun 2025	115
Tabel E.4.6.1	Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung Tahun 2025	118
Tabel E.4.7.1	Pengesahan Hibah Langsung TAYL Tahun 2025	119
Tabel F.1.1	Rincian BMN Belum Dialihkan Status dari Kementerian Pertanian ke Barantin	120
Tabel F.7.1	Rincian Proyek yang Didanai dari Pinjaman Luar Negeri	123
Tabel F.7.2	Pagu dan Realisasi Pendanaan Proyek dari Pinjaman Luar Negeri	124
Tabel F.7.3	Rincian Proyek dari Hibah Luar Negeri Terencana	124
Tabel F.7.4	Rekapitulasi Proyek dari Hibah Luar Negeri Langsung	125
Tabel F.9.1	Progress Alih Status Tahun 2022 – 2024	126
Tabel F.9.2	Rekapitulasi Alih Status TNI AD Tahun 2022-2024	126
Tabel F.2.4.2	Rekapitulasi Alih Status TNI AL Tahun 2022	126
Tabel F.9.3	Rencana Alih Status BMN TA.2025	127
Tabel F.9.4	Reklasifikasi Aset dari Persediaan Brigade TNI AD	127
Tabel F.9.5	Rekap Reklasifikasi Aset dari Persediaan Brigade TNI AL, TNI AU, POLDA dan UNHAN Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	127

## **RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN**



## RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan keuangan ini meliputi:

### I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah berupa Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya sebesar Rp2,305,502,448. atau 115.89% dari anggaran sebesar Rp 1,989,352,000.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 24,415,046,849. atau mencapai 96.68% dari alokasi anggaran sebesar Rp 25,253,705,000.

### II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember.

Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp 113,656,821,371. yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp 1,253,908,564 ; Aset Tetap sebesar Rp 112,338,030,807.; dan Aset Lainnya sebesar Rp 64,882,000. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0 dan Rp 113,656,821,371

### III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur Pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit dari Operasi, Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa, Pos Luar Biasa, dan Surplus/Defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2,281,436,792. sedangkan jumlah Beban adalah sebesar Rp23,350,879,395. sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional sebesar Rp(21,069,442,603.) Defisit Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing disajikan sebesar Rp(54,106,338.) dan Rp0 sehingga Kementerian Pertanian pada Tahun 2025 mengalami Defisit - LO sebesar Rp(21,123,548,941.)

### IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Juli 2025 adalah sebesar Rp112.649.243.668 ditambah Surplus/Defisit-LO sebesar Rp (21,123,548,941.) dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 22,088,177,969. sehingga Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 113,656,821,371.

## V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk juga dalam CaLK adalah pengungkapan informasi yang diharuskan oleh SAP untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

## LAPORAN REALISASI ANGGARAN



**I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

**BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2025 dan 2024**

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
<b>PENDAPATAN NEGARA</b>					
<b>PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>	B.1				
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	B.1.2	1,989,352,000	2,305,502,448	115.89	2,162,195,797
<b>JUMLAH PENDAPATAN NEGARA</b>		<b>1,989,352,000</b>	<b>2,305,502,448</b>	<b>115.89</b>	<b>2,162,195,797</b>
<b>BELANJA NEGARA</b>	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	5,056,585,000	5,025,523,925	99.39	4,716,375,084
Belanja Barang	B.2.2	17,051,244,000	16,254,795,195	95.33	6,145,684,209
Belanja Modal	B.2.3	3,145,876,000	3,134,727,729	99.65	586,521,168
<b>JUMLAH BELANJA NEGARA</b>		<b>25,253,705,000</b>	<b>24,415,046,849</b>	<b>96.68</b>	<b>11,448,580,461</b>

Jakarta, 06 Mei 2026

Kepala Balai Pengujian dan  
Sertifikasi Produk Hewan



**Drh. Dinar Hadi Wahyu Hartawan, M.Sc**

## NERACA



## II. NERACA

**BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN**  
**NERACA**  
**PER 31 Desember 2025**

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2025	2024
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	0	0
Persediaan	C.12	1,253,908,564	459,705,046
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>		<b>1,253,908,564</b>	<b>459,705,046</b>
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah	C.13	80,183,520,000	80,183,520,000
Peralatan dan Mesin	C.14	51,747,058,046	48,952,428,096
Gedung dan Bangunan	C.15	26,658,200,491	26,741,600,491
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.16	1,766,731,600	1,766,731,600
Aset Tetap Lainnya	C.17	48,500,000	52,500,000
Akumulasi Penyusutan	C.18	(48,065,979,330)	(45,570,507,227)
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>		<b>112,338,030,807</b>	<b>112,126,272,960</b>
<b>ASET LAINNYA</b>			
Aset Lain-lain	C.28	283,800,000	1,472,970,164
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	C.29	(218,918,000)	(1,409,704,502)
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>		<b>64,882,000</b>	<b>63,265,662</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>113,656,821,371</b>	<b>112,649,243,668</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.31	0	0
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.31	42,948,675	0
Uang Muka dari KPPN	C.32	0	0
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.33	0	0
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		<b>42,948,675</b>	<b>0</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>42,948,675</b>	<b>0</b>
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C.34	113,656,821,371	112,649,243,668
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>113,656,821,371</b>	<b>112,649,243,668</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>113,656,821,371</b>	<b>112,649,243,668</b>

Jakarta, 06 Mei 2026

Kepala Balai Pengujian dan  
Sertifikasi Produk Hewan

Drh. Dinar Hadi Wahyu Hartawan. M.Sc

## LAPORAN OPERASIONAL



## III. LAPORAN OPERASIONAL

**BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2025 dan 2024**

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2025	2024	Kenaikan (Penurunan)	%
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>					
<b>PENDAPATAN OPERASIONAL</b>					
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.2	2,281,436,792.	2,057,886,689.	223,550,103.	10.863
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>2,281,436,792.</b>	<b>2,057,886,689.</b>	<b>223,550,103.</b>	<b>10.863</b>
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>					
Beban Pegawai	D.3	5,025,523,925.	4,716,375,084.	309,148,841.	6.555
Beban Persediaan	D.4	2,652,344,165.	6,030,308,435.	(3,377,964,270.)	(56.016)
Beban Barang dan Jasa	D.5	4,630,751,891.	3,034,337,819.	1,596,414,072.	52.612
Beban Pemeliharaan	D.6	3,198,162,827.	2,746,777,361.	451,385,466.	16.433
Beban Perjalanan Dinas	D.7	1,364,388,192.	326,947,611.	1,037,440,581.	317.311
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.8	3,635,207,652.	0	3,635,207,652.	NaN
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	2,844,500,743.	2,886,262,141.	(41,761,398)	(51.134)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	0	0	0	NaN
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>23,350,879,395.</b>	<b>19,741,008,451.</b>	<b>3,609,870,944.</b>	<b>18.286</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>(21,069,442,603.)</b>	<b>(17,683,121,762.)</b>	<b>(3,386,320,841.)</b>	<b>19.15</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>					
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	D.11	(31,420,713)	23,949,097	(55,369,810)	(231.198)
Pendapatan Pelepasan Aset	D.12	24,065,656	23,949,097	116,559	0.487
Beban Pelepasan Aset	D.13	55,486,369	0	55,486,369	Infinity
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		(22,685,625.)	80,360,011	(103,045,636.)	(128.23)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	80,360,011	(80,360,011)	(100)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		22,685,625.	0	22,685,625.	Infinity
<b>JUMLAH DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA</b>		<b>(54,106,338.)</b>	<b>104,319,108</b>	<b>(158,415,446.)</b>	<b>(151.871)</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	D.13	<b>(21,123,548,941.)</b>	<b>(17,578,812,654.)</b>	<b>(3,544,736,287.)</b>	<b>20.165</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>					
<b>PENDAPATAN LUAR BIASA</b>	D.15	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>BEBAN LUAR BIASA</b>	D.16	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>	D.17	<b>(21,123,548,941.)</b>	<b>(17,578,812,654.)</b>	<b>(3,544,736,287.)</b>	<b>20.165</b>

Jakarta, 06 Mei 2026

Kepala Balai Pengujian dan  
Sertifikasi Produk Hewan

Drh. Dinar Hadi Wahyu Hartawan. M.Sc

**LAPORAN PERUBAHAN  
EKUITAS**



**IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

**BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2025 DAN 2024**

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
<b>EKUITAS AWAL</b>	E.1	112.649.243.668	120.415.872.235	(7,766,628,567)	(6.45)
<b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>	E.2	(21,123,548,941.)	(17,578,812,654.)	(3,544,736,287.)	20.16
<b>KOREKSI YANG MENAMBAH / MENGURANGI EKUITAS</b>		<b>42,948,675.</b>	<b>2,157,768.</b>	<b>40,790,907.</b>	<b>1,890.42</b>
Penyesuaian Nilai Aset	E.3	0	0	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.1	42,948,675.	0	42,948,675.	0
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.3.2	0	2,157,768.	(2,157,768.)	(100.)
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.3.3	0	0		
Koreksi Lain-lain	E.3.4	0	0		
<b>TRANSAKSI ANTAR ENTITAS</b>	E.4	22,088,177,969.	9,810,026,319.	12,278,151,650.	125.16
<b>KENAIKAN (PENURUNAN)</b>	E.5	<b>1,007,577,703.</b>	<b>(7,766,628,567.)</b>	<b>8,774,206,270.</b>	<b>(112.97)</b>
<b>EKUITAS AKHIR</b>	E.6	<b>113,656,821,371.</b>	<b>112,649,243,668.</b>	<b>1,007,577,703.</b>	<b>0.89</b>

Jakarta, Januari 2026

Kepala Balai Pengujian dan  
Sertifikasi Produk Hewan



Drh. Dinar Hadi Wahyu Hartawan, M.Sc

**CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN**



## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan

Tugas BPMSPH adalah melaksanakan pemeriksaan, pengujian, dan sertifikasi keamanan, dan mutu produk hewan. Di dalam melaksanakan tugas tersebut, BPMSPH menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran, pelaksanaan kerjasama, serta penyiapan evaluasi dan pelaporan
2. Pelaksanaan penyiapan sampel pengujian keamanan dan mutu produk hewan
3. Pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian keamanan dan mutu produk hewan
4. Penyiapan perumusan hasil pengujian keamanan dan mutu produk hewan
5. Pengembangan teknik dan metode pemeriksaan dan pengujian keamanan dan mutu produk hewan
6. Pelaksanaan pemantauan dan surveilans keamanan dan mutu produk hewan
7. Pelaksanaan pengambilan sampel, pemeriksaan, pengujian dan pemberian saran untuk mendukung sertifikat unit usaha produk hewan
8. Pelaksanaan sertifikasi hasil uji dan sertifikasi keamanan dan mutu produk hewan
9. Pelaksanaan kajian resiko produk hewan berdasarkan hasil uji
10. Pelaksanaan pengkajian batas maksimum residu dan cemaran mikroba
11. Pelaksanaan pelayanan laboratorium rujukan dan acuan pengujian keamanan dan mutu produk hewan
12. Pelaksanaan bimbingan teknis dan diseminasi informasi laboratorium veteriner yang membidangi kesehatan masyarakat veteriner
13. Penyelenggaraan uji profisiensi produk hewan;
14. Pelayanan teknis kegiatan pemeriksaan, pengujian, dan sertifikasi keamanan dan mutu produk hewan;
15. Pelaksanaan Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga BPMSPH

### A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk

penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

### **A.3. Basis Akuntansi**

Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

### **A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

### **A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan adalah sebagai berikut:

**(1) Pendapatan - LRA**

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

**(2) Pendapatan - LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

**(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

**(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

**(5) Aset**

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

**a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:  
harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;  
harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;  
harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

**b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
  - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
  - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
  - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

**c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

**d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

**e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

#### (6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - a. Kewajiban Jangka Pendek**

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
  - b. Kewajiban Jangka Panjang**

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

#### (6) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## B PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

### B.1. PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2025 adalah sebesar Rp348.647.343.007,00 atau 183,87% dari anggaran sebesar Rp189.617.368.000,00. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan TA 2025 adalah sebagai berikut.

**Tabel B.1 Anggaran dan Realisasi PNBPA TA 2025**

Uraian		ESTIMASI PENDAPATAN	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
<b>42</b>	<b>PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>				
<b>425</b>	<b>PENDAPATAN PNBPA LAINNYA</b>				
<b>4251</b>	<b>PENDAPATAN DARI PENJUALAN, PENGELOLAAN BMN, IURAN BADAN USAHA DAN</b>				
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	24,065,656.	0	23,949,097.
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	0	185,846.
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	79,830,000.	94,980,000.	118.98	94,980,000.
<b>JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251</b>		<b>79,830,000.</b>	<b>119,114,943.</b>	<b>149.21</b>	<b>84,459,097</b>
<b>4252</b>	<b>PENDAPATAN ADMINISTRASI DAN PENEGAKAN HUKUM</b>				
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	1,959,352,000.	2,183,869,750	110.08	1,956,962,000.
<b>JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4252</b>		<b>1,959,352,000.</b>	<b>2,183,869,750.</b>	<b>111.46</b>	<b>1,956,962,000.</b>
<b>4254</b>	<b>PENDAPATAN PENDIDIKAN. BUDAYA. RISET. DAN TEKNOLOGI</b>				
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan		5,000,000.	0	5,400,000.
<b>JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4254</b>			<b>5,000,000.</b>		<b>5,400,000.</b>
<b>4258</b>	<b>PENDAPATAN DENDA</b>				
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	5,777,042.	0	358,843.
<b>JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4258</b>			<b>5,777,042.</b>	<b>0</b>	<b>358,843.</b>
<b>4259</b>	<b>Pendapatan Lain-Lain</b>				
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0	79,222,011.
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0	1,138,000.
<b>JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259</b>					<b>80,360,011.</b>
<b>JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42</b>		<b>1,989,352,000.</b>	<b>2,305,502,448.</b>	<b>115.89</b>	<b>2,162,195,797.</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>1,989,352,000.</b>	<b>2,305,502,448.</b>	<b>115.89</b>	<b>2,162,195,797.</b>

### B.1.1. PNBPA Lainnya

Realisasi Pendapatan PNBPA Lainnya TA 2025 adalah sebesar Rp2,305,502,448. atau 115.89% dari anggaran pendapatan PNBPA Lainnya sebesar Rp1,989,352,000.

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan pendapatan PNBPA Lainnya TA 2025 sebagai berikut:

1. Pendapatan Dari Penjualan Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi sebesar Rp86,790,000. merupakan penerimaan yang berasal dari Perolehan dari sewa ruang rapat dan ruang istirahat gedung BIMTEK KESMAVET

No	Nama Pengguna Layanan
1	Balai Besar Veteriner Wates
2	Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan
3	Balai Veteriner Medan
4	Balai Veteriner Subang
5	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG
6	DIREKTORAT KESMAVET - KEMENTERIAN PERTANIAN
7	KELOMPOK TANI PANTI SARI
8	PT. ABI NISA SEJAHTERA
9	PT. MAMURU DAIRY FARM
10	AMELIA LAILA K
11	BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
12	BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN TANJUNG PRIOK
13	BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I JAMBI
14	BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK SIBORONGBORONG
15	BALAI UJI TERAP TEKNIK DAN METODE KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN
16	BALAI VETERINER BOYOLALI
17	BENS FARM
18	Chistina Winarti
19	CV. ARJUNA GROUP
20	CV. AVISTA FOOD SEMARANG (AVISTA SEMARANG)
21	CV. FIRST CHOICE FOOD
22	CV. INTAN JAYA ABADI
23	CV. KARYA MANDIRI BERSAMA
24	CV. MAJU SEJAHTERA LESTARI
25	CV. MITRA MANAJEMEN BERSAMA
26	CV. MITRACO HARAPAN JAYA
27	CV. MUTIARA ALAM RAYA
28	CV. NIRWANA FARM JAYA

No	Nama Pengguna Layanan
41	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN PEMERINTAH KOTA BOGOR
42	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, DAN PERIKANAN PEMERINTAH KOTA DEPOK
43	DINAS PERTANIAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
44	DR. DINDA IRYAWATI BEDY SASKITO, MKM
45	drh. ARIF WICAKSONO
46	KEMALA ORGANIK
47	LPPOM MUI
48	MITRA DISKON SWALAYAN JAMBU DUA
49	MITRA TANI FARM
50	MUHAMMAD IRFAN THAMMY
51	NOVIETA ANUNG PRAMONO
52	PERUMDA DHARMA JAYA
53	PT CHARIS BERKAT UTAMA
54	PT MAKMUR MEKAR SEJAHTERA
55	PT NUGEN BIOSCIENCE INDONESIA
56	PT SEGAR BARU ABADI
57	PT Tanjung Terdana - Sinar Karya
58	PT. ADIPURNA MRANATA JAYA
59	PT. AGRO BOGA UTAMA
60	PT. AGRO NUSA PROTINDO
61	PT. AGRO WESTINDO ABADI
62	PT. ANTHONY JAYA PERKASA
63	PT. ANZINDO GRATIA INTERNATIONAL
64	PT. ARGO MAKMUR PROTEINDO
65	PT. ARTA GLOBAL SUKSES
66	PT. ASIA PRATAMA WALINDO
67	PT. BERDIKARI
68	PT. BERDIKARI UNIT CIANJUR RPHU

29	CV. PRIMA JAYA MANDIRI
31	CV. SARANA LANGGENG SAMPURNA
31	CV. SEKAR AYU
32	CV. SENTRA PROTEIN PRIMA
33	CV. SICMA INTI UTAMA
34	CV. SUMBER REZEKI INTERNASIONAL
35	CV. SUMBER UNGGAS
36	CV. SURYA ABADI TELUR ASIN
37	CV. SURYA CEMERLANG ABADI
38	CV. TIGA SELARAS MAKMUR BERSAMA
39	CV. TRI MULIA SEJAHTERA
40	CV. WARISAN MATAHARI MAKMUR

69	PT. BERKAH GLOBAL BUSINESS
70	PT. BERKAT MANDIRI PRIMA
71	PT. BERSAMA BOGA PERKASA
72	PT. BHARANY TRI MITRA
73	PT. BOUNTY SEGAR INDONESIA
74	PT. BUANA MULIA INDONESIA
75	PT. BUMI AYU SEJATI
76	PT. BUMI MAESTROAYU
77	PT. CHAROEN POKHPAND INDONESIA FOOD DIV MAJALENGKA
78	PT. CHAROEN POKHPAND INDONESIA FOOD DIVISION - RPHU LEBAK
79	PT. CHAROEN POKHPAND INDONESIA - DUCK DIVISION
80	PT. CHAROEN POKHPAND INDONESIA - MUARA ENIM PLANT

2. Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum sebesar Rp2,183,869,750. merupakan penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya, diantaranya:

No	Nama Pengguna Layanan
1	Balai Besar Veteriner Wates
2	Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan
3	Balai Veteriner Medan
4	Balai Veteriner Subang
5	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG
6	DIREKTORAT KESMAVET - KEMENTERIAN PERTANIAN
7	KELOMPOK TANI PANTI SARI
8	PT. ABI NISA SEJAHTERA
9	PT. MAMURU DAIRY FARM
10	AMELIA LAILA K
11	BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

No	Nama Pengguna Layanan
41	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN PEMERINTAH KOTA BOGOR
42	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, DAN PERIKANAN PEMERINTAH KOTA DEPOK
43	DINAS PERTANIAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
44	DR. DINDA IRYAWATI BEDY SASKITO, MKM
45	drh. ARIF WICAKSONO
46	KEMALA ORGANIK
47	LPPOM MUI
48	MITRA DISKON SWALAYAN JAMBU DUA
49	MITRA TANI FARM
50	MUHAMMAD IRFAN THAMMY
51	NOVIETA ANUNG PRAMONO

12	BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN TANJUNG PRIOK	52	PERUMDA DHARMA JAYA
13	BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I JAMBI	53	PT CHARIS BERKAT UTAMA
14	BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK SIBORONGBORONG	54	PT MAKMUR MEKAR SEJAHTERA
15	BALAI UJI TERAP TEKNIK DAN METODE KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN	55	PT NUGEN BIOSCIENCE INDONESIA
16	BALAI VETERINER BOYOLALI	56	PT SEGAR BARU ABADI
17	BENS FARM	57	PT Tanjung Terdana - Sinar Karya
18	Chistina Winarti	58	PT. ADIPURNA MRANATA JAYA
19	CV. ARJUNA GROUP	59	PT. AGRO BOGA UTAMA
20	CV. AVISTA FOOD SEMARANG (AVISTA SEMARANG)	60	PT. AGRO NUSA PROTINDO
21	CV. FIRST CHOICE FOOD	61	PT. AGRO WESTINDO ABADI
22	CV. INTAN JAYA ABADI	62	PT. ANTHONY JAYA PERKASA
23	CV. KARYA MANDIRI BERSAMA	63	PT. ANZINDO GRATIA INTERNATIONAL
24	CV. MAJU SEJAHTERA LESTARI	64	PT. ARGO MAKMUR PROTEINDO
25	CV. MITRA MANAJEMEN BERSAMA	65	PT. ARTA GLOBAL SUKSES
26	CV. MITRACO HARAPAN JAYA	66	PT. ASIA PRATAMA WALINDO
27	CV. MUTIARA ALAM RAYA	67	PT. BERDIKARI
28	CV. NIRWANA FARM JAYA	68	PT. BERDIKARI UNIT CIANJUR RPHU
29	CV. PRIMA JAYA MANDIRI	69	PT. BERKAH GLOBAL BUSINESS
31	CV. SARANA LANGGENG SAMPURNA	70	PT. BERKAT MANDIRI PRIMA
31	CV. SEKAR AYU	71	PT. BERSAMA BOGA PERKASA
32	CV. SENTRA PROTEIN PRIMA	72	PT. BHARANY TRI MITRA
33	CV. SICMA INTI UTAMA	73	PT. BOUNTY SEGAR INDONESIA
34	CV. SUMBER REZEKI INTERNASIONAL	74	PT. BUANA MULIA INDONESIA
35	CV. SUMBER UNGGAS	75	PT. BUMI AYU SEJATI
36	CV. SURYA ABADI TELUR ASIN	76	PT. BUMI MAESTROAYU
37	CV. SURYA CEMERLANG ABADI	77	PT. CHAROEN POKHPAND INDONESIA FOOD DIV MAJALENGKA
38	CV. TIGA SELARAS MAKMUR BERSAMA	78	PT. CHAROEN POKHPAND INDONESIA FOOD DIVISION - RPHU LEBAK
39	CV. TRI MULIA SEJAHTERA	79	PT. CHAROEN POKHPAND INDONESIA - DUCK DIVISION
40	CV. WARISAN MATAHARI MAKMUR	80	PT. CHAROEN POKHPAND INDONESIA - MUARA ENIM PLANT

Pemungutan PNBP mengacu pada regulasi tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP sebagai berikut:

1. PP Nomor 8 Tahun 2024 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian Pertanian.
2. PMK Nomor 85 Tahun 2024 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBPN yg bersifat volatil yang berlaku pada Kementerian Pertanian, dan Permentan Nomor 36 Tahun 2024 tentang besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif yang berlaku pada Kementerian Pertanian. Sedangkan untuk PNBPN terkait pemanfaatan BMN seperti sewa/kerjasama pemanfaatan mengacu pada PMK 115/PMK.06/2020 tentang pemanfaatan BMN, yakni harus mendapat persetujuan dari KPKNL/DJKN sesuai kewenangannya. Terakhir semua PNBPN yg bersifat umum yang berlaku pada semua instansi pengelola PNBPN mengacu pada PP Nomor 47 Tahun 2024.

## B.2. BELANJA

Realisasi Belanja TA 2025 adalah sebesar Rp5.340.542.388 atau 24,59% dari anggaran belanja sebesar Rp17.071.847.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel B.2.1 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025**

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Pegawai	5,056,585,000.	5,025,523,925.	99.39	4,716,375,084.
Belanja Barang	17,051,244,000.	16,254,795,195.	95.33	6,145,684,209.
Belanja Modal	3,145,876,000.	3,134,727,729.	99.65	586,521,168.
<b>Jumlah</b>	<b>25,253,705,000.</b>	<b>24,415,046,849.</b>	<b>41.66</b>	<b>11,448,580,461.</b>

Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program TA 2025 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel B.2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025 Berdasarkan Program**

KODE	Uraian Program	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
01	RUPIAH MURNI				
5891	Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak	0	0	0	49,832,734.
1785	Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak	4,195,800,000.	3,941,154,954.	93.93	0
1786	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	8,242,280,000.	7,999,572,620.	97.09	0
1787	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	11,482,759,000.	11,159,601,973.	97.19	10,218,214,418.
<b>JUMLAH BELANJA RUPIAH MURNI</b>		<b>23,920,839,000.</b>	<b>23,100,329,547.</b>		<b>10,218,214,418.</b>
04	PNBP				
1786	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1,332,866,000.	1,314,717,302.	98.64	1,230,366,043.
<b>JUMLAH BELANJA PNBPN</b>		<b>1,332,866,000.</b>	<b>1,314,717,302.</b>	<b>98.64</b>	<b>1,230,366,043.</b>
<b>J U M L A H</b>		<b>25,253,705,000.</b>	<b>24,415,046,849.</b>	<b>96.69</b>	<b>11,448,580,461.</b>

**B.2.1. BELANJA PEGAWAI**

Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp5,025,523,925 dan Rp4,716,375,084 Realisasi belanja TA 2025 mengalami Kenaikan sebesar Rp309,148,841 atau 6,151% dibandingkan TA 2024.

Kenaikan tersebut terjadi karena adanya tahun berjalan belum seluruhnya selesai dan adanya mutasi pegawai yang naik Jabatan serta adanya pengangkatan PPPK.

**Tabel B.2.1.1. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2025**

KODE	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	3,185,345,000.	3,185,344,260.	100	3,070,562,000.
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	43,000	41,635.	96.83	49,123.
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	201,155,000.	201,154,082.	100	194,906,340.
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	68,429,000.	68,427,307.	100	65,441,688.
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	25,480,000.	25,480,000.	100	13,860,000.
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	506,530,000.	506,530,000.	100	518,050,000.
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	32,724,000.	32,721,422.	99.99	30,982,929.
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	166,278,000.	166,276,320.	100	160,482,720.
511129	Belanja Uang Makan PNS	460,372,000.	432,828,550.	94.02	445,276,000.
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	34,670,000.	34,670,000.	100	32,230,000.
<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111</b>		<b>4,681,026,000.</b>	<b>4,653,473,576.</b>	<b>99.41</b>	<b>4,531,840,800.</b>
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	255,326,000.	255,325,746.	100	127,800,400.
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	7,000.	5,583.	79.76	2,636.
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	14,826,000.	14,825,385.	100	4,674,740.
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	3,779,000.	3,777,125.	99.95	934,948.
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	20,160,000.	20,160,000.	100	19,440,000.
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	15,608,000.	15,606,510.	99.99	4,924,560.
511628	Belanja Uang Makan PPPK	57,123,000.	53,620,000.	93.87	22,779,000.
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	8,730,000.	8,730,000.	100	0
<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116</b>		<b>375,559,000.</b>	<b>372,050,349.</b>	<b>99.07</b>	<b>180,556,284.</b>
512211	Belanja Uang Lembur	0	0	0	3,798,000.
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	0	0	0	180,000.
<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,978,000.</b>
<b>JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51</b>		<b>5,056,585,000.</b>	<b>5,025,523,925.</b>	<b>99.39</b>	<b>4,716,375,084.</b>

**B.2.2. BELANJA BARANG**

Realisasi Belanja Barang TA 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp16,254,795,195 dan Rp6,145,684,209. Atau 37.808% ada kenaikan Anggaran Rincian anggaran dan realisasi belanja barang TA 2025 sesuai jenisnya disajikan pada tabel berikut.

**Tabel B.2.2.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2025 Berdasarkan Jenis**

KODE	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
<b>Belanja Barang</b>					
Belanja Barang Operasional					
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	992,476,000.	952,001,204.	95.92	1,297,589,142.
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	60,040,000.	55,290,000.	92.09	47,889,670.
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	20,000,000.	17,668,310.	88.34	11,122,280.
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	120,780,000.	120,680,000.	99.92	160,474,000.
<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211</b>		<b>1,512,794,000.</b>	<b>1,193,296,000.</b>	<b>54.88</b>	<b>1,517,075,092.</b>
Belanja Barang Non Operasional					

Laporan Keuangan BPMSPH 567275 Tahun 2025 (Audited)

521211	Belanja Bahan	687,651,000.	592,859,446.	86.22	29,999,805.
521213	Belanja Honor Output Kegiatan				
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,731,734,000.	1,644,972,231.	94.99	470,824,624.
<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212</b>		<b>2,419,385,000.</b>	<b>2,237,831,677.</b>	<b>92.50</b>	<b>500,824,429.</b>
Belanja Barang Persediaan					
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	299,549,000.	287,063,660.	95.83	192,484,631.
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	3,248,800,000.	3,179,719,717.	97.87	536,092,983.
<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218</b>		<b>3,548,349,000.</b>	<b>3,466,783,377.</b>	<b>97.7</b>	<b>728,577,614.</b>
Belanja Jasa					
522111	Belanja Langganan Listrik	938,676,000.	938,357,785.	99.97	775,793,949.
522112	Belanja Langganan Telepon	4,500,000.	4,180,565.	92.9	3,563,513.
522113	Belanja Langganan Air	57,240,000.	52,229,050.	91.25	56,735,000.
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	220,440,000.	220,350,000.	99.96	219,000,000.
522141	Belanja Sewa	0	0.	0.	0.
500151	Belanja Jasa Profesi	59,200,000.	45,450,000.	76.77	34,500,000.
<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221</b>		<b>1,280,056,000.</b>	<b>1,260,567,400.</b>	<b>98.48</b>	<b>1,089,592,462.</b>
Belanja Pemeliharaan					
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	959,790,000.	948,151,687.	98.79	528,640,429.
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	560,607,000.	552,375,001.	98.53	0.
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	456,255,000.	430,777,066.	94.42	312,853,447.
523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1,322,906,000.	1,213,073,629.	91.70	1,141,173,125.
<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231</b>		<b>3,299,558,000.</b>	<b>3,144,377,383.</b>	<b>95.30</b>	<b>1,982,667,001.</b>
Belanja Perjalanan Dinas					
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,363,073,000.	1,300,225,588.	95.39	250,972,268.
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	17,752,000.	17,534,583.	98.78	18,079,500.
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4,515,000.	4,396,000	97.36	1,620,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	58,320,000.	42,232,021	72.41	56,275,843.
<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241</b>		<b>1,367,304,432.</b>	<b>1,364,388,192.</b>	<b>94.51</b>	<b>326,947,611.</b>
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda					
526115	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada masyarakat/Pemda	3,866,940,000.	3,635,207,652.	94.01	0
<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5261</b>		<b>3,866,940,000.</b>	<b>3,635,207,652.</b>	<b>94.01</b>	<b>0</b>
<b>JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52</b>		<b>17,051,244,000.</b>	<b>16,254,795,195.</b>	<b>95.33</b>	<b>3,336,129,723.</b>

### B.2.3. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp3,134,727,729 dan Rp586,521,168 Realisasi Belanja Modal TA 2024 mengalami Kenaikan sebesar Rp18.170% dibandingkan periode TA 2025. Hal tersebut secara signifikan dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah untuk memprioritaskan alokasi belanja prioritas selain pagu belanja modal, terutama untuk menambah alokasi bantuan pemerintah kepada masyarakat.

**Tabel B.2.3.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2025**

KODE	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
	Belanja Modal				
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3,145,876,000.	3,134,727,729.	99.65	586,521,168.
<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 53</b>		<b>3,145,876,000.</b>	<b>3,134,727,729.</b>	<b>99.65</b>	<b>586,521,168.</b>

**C PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA****ASET**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau social di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Saldo Aset per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp113,656,821,371 dan Rp112.649.243.668 Saldo Aset per 31 Desember 2025 mengalami Kenaikan sebesar Rp1,007,577,703 atau 0,89%, apabila dibandingkan dengan saldo Aset per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.1 Saldo Aset Per 31 Desember 2025 dan 2024**

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Aset Lancar	1,253,908,564.	459.705.046
Aset Tetap	112,338,030,807.	112.126.272.960
Piutang Jangka Panjang	0	0
Aset Lainnya	64,882,000.	63.265.662
<b>Jumlah</b>	<b>113,656,821,371</b>	<b>112,649,243,668</b>

**ASET LANCAR**

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp1,253,908,564. dan Rp459,705,046 Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp794,203,518 atau 172.76% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lancar per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.2 Saldo Aset Lancar Per 31 Desember 2025 dan 2024**

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	0	0
Persediaan	1,253,908,564.	459,705,046
<b>Jumlah</b>	<b>1,253,908,564</b>	<b>459,705,046</b>

**C.1. KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN**

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0. Utang jangka pendek lainnya berupa Pajak belum disetorkan dan Rp0 berupa Uang Persediaan dari KPPN

**C.2. KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN**

Kas di Bendahara Penerimaan adalah uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

**C.3. KAS LAINNYA DAN SETARA KAS**

Kas Lainnya dan setara kas lainnya yang dikelola Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan merupakan saldo kas pada Kementerian Negara/Lembaga selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di BLU.

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0,00. Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp0 atau 0%, apabila dibandingkan dengan saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024 berupa utang jangka pendek lainnya berupa pajak yang belum disetorkan oleh Bendahara

**C.4. PERSEDIAAN**

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp1,253,908,564 dan Rp459,705,046. Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp794,203,518 atau 172.76% apabila dibandingkan dengan saldo Persediaan per 31 Desember 2024. Rincian saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.12.1 Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024**

No.	Uraian Persediaan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Barang Konsumsi	622,566,592	279,541,540	343,025,052
2	Bahan untuk Pemeliharaan	3,360,999	4,838,889	(1,477,890)
3	Suku Cadang	59,827,458	59,206,517	620,941

No.	Uraian Persediaan	31 Desember2025 (Rp)	31 Desember2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
4	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0
5	Bahan Baku	568,153,515	116,118,100	452,035,415
6	Persediaan Lainnya	0	0	0
<b>JUMLAH</b>		<b>1,253,908,564</b>	<b>459,705,046</b>	<b>794,203,518</b>

## ASET TETAP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Saldo Aset Tetap per 31 Desember2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp113,656,821,371 dan Rp112,649,243,668 Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 mengalami Kenaikan sebesar Rp211,757,847 atau 0.19% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap per 31 Desember2024. Rincian saldo Aset Tetap per 31 Desember2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	Persentase
Tanah	80,183,520,000.	80,183,520,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	51,747,058,046.	48,952,428,096	2,794,629,950	5.71
Gedung dan Bangunan	26,658,200,491.	26,741,600,491	(83,400,000)	(0.31)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1,766,731,600.	1,766,731,600	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	48,500,000.	52,500,000	(4,000,000)	(0.31)
AKUMULASI PENYUSUTAN	(48,065,979,330.)	(45,570,507,227)	(2,495,472,103)	5.48
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>112,338,030,807</b>	<b>112,126,272,960</b>	<b>211,757,847</b>	<b>0.19</b>

## C.2. ASET TETAP

### C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan per 31 Desember2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.80.183.520.000 dan Rp80,183,520,000

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Tanah	80,183,520,000	80,183,520,000
<b>Jumlah</b>	<b>80,183,520,000</b>	<b>80,183,520,000</b>

Pada Tanah Tidak terdapat nilai penambahan dan penurunan dibanding tahun lalu

### C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp48,808,731,317 dan Rp49,986,048,834

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Peralatan dan Mesin	51,747,058,046	48,952,428,096
<b>Jumlah</b>	<b>51,747,058,046</b>	<b>48,952,428,096</b>

Pada peralatan dan mesin terdapat penurunan nilai sebesar Rp.(143,697,779) atau sebesar (0.92%)

### C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 26,658,200,491 dan Rp26,741,600,491

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Gedung dan Bangunan	26,658,200,491	26,741,600,491
<b>Jumlah</b>	<b>26,658,200,491</b>	<b>26,741,600,491</b>

Gedung dan Bangunan terdapat pengurangan senilai Rp. (83,400,000) pada tahun 2025 dan tahun 2024

### C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 1,766,731,600 dan Rp. 1,766,731,600

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1,766,731,600	1,766,731,600
<b>Jumlah</b>	<b>1,766,731,600</b>	<b>1,766,731,600</b>

Jalan, Irigasi dan Jaringan tidak terdapat penambahan dan pengurangan nilai baik tahun 2025 dan tahun 2024

### C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 48,500,000. dan Rp.52,500,000.

Uraian	31 Desember2025	31 Desember 2024
Aset Tetap Lainnya	48,500,000.	52,500,000
<b>Jumlah</b>	<b>48,500,000</b>	<b>52,500,000</b>

Aset Tetap Lainnya tidak terdapat pengurangan senilai Rp(4,000,000) terdapat penyusutan pada aset lainnya

#### C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nilai Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan per 31 Desember2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. yang merupakan pembangunan gedung dan bangunan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca. Rincian lebih lanjut dari Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran.

#### C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan per 31 Desember2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp(48,065,979,330.) dan Rp(45,570,507,227)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember2025 adalah sebagai berikut:

#### Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	80,183,520,000.	0	80,183,520,000.
2	Peralatan dan Mesin	51,747,058,046.	42,232,797,301	11,446,997,171
3	Gedung dan Bangunan	26,741,600,491	5,188,117,247	22,075,451,819
4	Irigasi	949,000	607,360	417,560
5	Jaringan	1,765,782,600.	595,957,422	1,210,516,360
6	Aset Tetap Lainnya	48,500,000.	(48,500,000)	0
	<b>Jumlah</b>	<b>160,487,410,137.</b>	<b>47,968,979,330.</b>	<b>34,733,382,910</b>

### C.3. ASET LAINNYA

#### C.3.1. Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp283,800,000 dan Rp1,472,970,164 Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan serta telah mengusulkan penghapusan dari Biro Perlengkapan mengenai penghapusan dari BMN.

Kelompok Barang	Jml	Sal 31 des 24	Mutasi				Total	
			Jml	Tambah	Jml	Berkurang		Jml
Alat kantor	13	77.021.000,	0	0,	0	0	13	77.021.000,
Alat rumah tangga	31	38.446.375,	0	0,	0	0	31	38.446.375,
Alat studio	1	2.785.000,	0	0,	0	0	1	2.785.000,
Alat komunikasi	3	9.289.000,	0	0,	0	0	3	9.289.000,
Alat kedokteran	1	16.310.000,	1	97.983.000,	0	0	2	114.283.000,
Unit alat laboratorium	22	948.298.000,	0	0,	0	0	22	948.298.000,
unit alat laboratorium kimia nuklir	1	166.100.000,	0	0,	0	0	1	166.100.000,
Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	4	50.461.989,	0	0,	0	0	4	50.461.989,
Alat khusus kepolisian	1	9.310.000,	0	0,	0	0	1	9.310.000,
Komputer unit	5	66.990.000,	1	21.296.000,	0	0	6	88.286.000,
Peralatan komputer	14	65.640.800,	0	0,	0	0	14	65.640.800,
Alat eksplorasi geofisika	1	1.313.000,	0	0,	0	0	1	1.313.000,
Pengolahan dan pemurnian	5	21.025.000,	0	0,	0	0	5	21.025.000,
<b>Total</b>	<b>101</b>	<b>1.073.767.525</b>	<b>2</b>	<b>119.279.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103</b>	<b>1.592.249.164</b>

#### C.3.2. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp(218,918,000.) dan Rp(1,409,704,502)

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Lain-lain	283,800,000.	(218,918,000.)	64,882,000.
<b>Akumulasi Penyusutan</b>		<b>283,800,000.</b>	<b>(218,918,000.)</b>	<b>64,882,000.</b>

**C.4. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**

**C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga**

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp.0 adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan .

Utang tersebut didapat dari kegiatan kegiatan yang belum selesai dan belum terbayarkan

**C.4.2. Uang Muka dari KPPN**

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp 0 Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

**C.4.3. Kas Lainnya dan Setara Kas**

Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp 0 Kas Lainnya dan Setara Kas sebagai pada rekening Bendahara merupakan pajak yang belum disetor ke negara berupa uang pada rekening bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

**C.4.4. Utang Yang Belum Ditagihkan**

Utang yang belum ditagihkan per 31 Desember2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp 0 Utang yang belum ditagihkan adalah berupa dari belanja barang atau dari kegiatan yang belum selesai atau yang belum datang dari barang yang diadakan melalui Inaproc ataupun dari pengadaan barang jasa lainnya serta termasuk uang muka kegiatan yang sedang dilakukan oleh BPMSPH

## C.5. EKUITAS

### C.5. Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp113,656,821,371 dan Rp. 112,649,243,668 Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

#### RINCIAN TRANSAKSI ANTAR ENTITAS TINGKAT SATKER MENURUT AKUN SAMPAI DENGAN DESEMBER 2025

Akun	Uraian	2025	2024
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	24,415,046,849.	11,448,580,461.
313121	Diterima dari Entitas Lain	-2,305,502,448.	-2,162,195,797.
313211	Transfer Keluar	-21,366,432.	0.
313221	Transfer Masuk	0.	523,641,655.
<b>JUMLAH</b>		<b>22,088,177,969.</b>	<b>9,810,026,319.</b>

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	112,649,243,668.	120,415,872,235.	(7,766,628,567.)	(6.45)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(21,123,548,941.)	(17,578,812,654.)	(3,544,736,287.)	20.16
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	42,948,675.	2,157,768.	40,790,907.	1,890.42
PENYESUAIAN NILAI ASET	0.	0.	0.	0.
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	42,948,675.	0.	42,948,675.	0.
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0.	2,157,768.	(2,157,768.)	(100.)
SELISIH REVALUASI ASET	0.	0.	0.	0.
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0.	0.	0.	0.
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	22,088,177,969.	9,810,026,319.	12,278,151,650.	125.16
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	1,007,577,703.	(7,766,628,567.)	8,774,206,270.	(112.97)
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>113,656,821,371.</b>	<b>112,649,243,668.</b>	<b>1,007,577,703.</b>	<b>0.89</b>

## D PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

### KEGIATAN OPERASIONAL

Kegiatan Operasional adalah transaksi dan aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah, yang menghasilkan pendapatan dan

menimbulkan beban. Dalam konteks pemerintah, kegiatan operasional ini lebih berfokus pada pelayanan publik dan pelaksanaan anggaran.

Rincian Kegiatan Operasional Kementerian Pertanian Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel D.1 Kegiatan Operasional BPMSPH Tahun 2025 dan 2024**

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Pendapatan Operasional	2,281,436,792.	2,057,886,689.
Beban Operasional	23,350,879,395.	19,741,008,451.
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional</b>	<b>(21,069,442,603.)</b>	<b>(17,683,121,762.)</b>

### **PENDAPATAN OPERASIONAL**

Pendapatan operasional adalah pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas utama pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan melaksanakan program-program yang telah ditetapkan. Pendapatan ini tidak termasuk penerimaan yang bersifat non-operasional, seperti pendapatan hibah atau pendapatan dari penjualan aset.

Nilai Pendapatan Operasional Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp2,281,436,792 dan Rp2,057,886,689. Nilai Pendapatan Operasional Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp225,006,750 atau 15.81% apabila dibandingkan dengan Nilai Pendapatan Operasional Tahun 2024.

#### **D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya**

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya penerimaan pemerintah pusat yang berasal dari sumber-sumber selain pajak, seperti penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan pemerintah, hasil pengelolaan kekayaan negara, dan sumber-sumber lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Nilai Pendapatan PNBP Lainnya Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp2,281,436,792. dan Rp2,057,886,689. Nilai Pendapatan Operasional Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp 223,550,103. atau 10.863% apabila dibandingkan dengan nilai Pendapatan PNBP Lainnya Tahun 2024.

### **BEBAN OPERASIONAL**

Beban Operasional adalah semua pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional untuk menyelenggarakan fungsi dan tugas pemerintah. Beban ini mencerminkan penggunaan sumber daya ekonomi (seperti uang, barang, atau jasa) yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan publik, melaksanakan program, atau mendukung aktivitas operasional lainnya.

Nilai Beban Operasional Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp23,350,879,395. dan Rp19,741,008,451. Nilai Beban Operasional Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp3,609,870,944. atau 18.286% apabila dibandingkan dengan Nilai Beban Operasional Tahun 2024.

## D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah biaya yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah terkait dengan pemberian imbalan kepada pegawai, baik pegawai negeri sipil (PNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), maupun tenaga honorer, sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan merupakan salah satu komponen utama dalam pengeluaran pemerintah.

Nilai Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 5,025,523,925 dan Rp4,716,375,084 Nilai Beban Pegawai Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp309,508,841 atau 6.15% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Pegawai Tahun 2024. Rincian Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel D.3.1.1 Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024**

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Gaji Pokok PNS	3,185,344,260.	3,070,562,000.	114,782,260.
Beban Pembulatan Gaji PNS	41,875.	-146.	42,021.
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	-240.	49,269.	-49,509.
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	201,154,082.	194,906,340.	6,247,742.
Beban Tunj. Anak PNS	68,427,307.	65,441,688.	2,985,619.
Beban Tunj. Struktural PNS	25,480,000.	13,860,000.	11,620,000.
Beban Tunj. Fungsional PNS	506,530,000.	518,410,000.	-11,880,000.
Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS	0	(360,000)	(360,000)
Beban Tunj. PPh PNS	32,721,422.	30,982,929.	1,738,493.
Beban Tunj. Beras PNS	166,276,320.	160,482,720.	5,793,600.
Beban Uang Makan PNS	433,637,000.	445,276,000.	(11,639,000)
Pengembalian Beban Uang Makan PNS	-808,450.		(808,450)
Beban Tunjangan Umum PNS	34,670,000.	32,230,000.	2,440,000
Beban Gaji Pokok PPPK	255,325,746.	127,800,400.	127,525,346
Beban Pembulatan Gaji PPPK	5,583.	2,636.	2,947
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	14,825,385.	4,674,740.	10,150,645
Beban Tunjangan Anak PPPK	3,777,125.	934,948.	2,842,177
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	20,160,000.	19,440,000.	720,000
Beban Tunjangan Beras PPPK	15,606,510.	4,924,560.	10,681,950
Beban Uang Makan PPPK	53,620,000.	22,779,000.	30,841,000
Beban Tunjangan Umum PPPK	8,730,000.	0	8,730,000
Beban Uang Lembur	0	3,798,000.	(3,798,000)
Beban Uang Lembur PPPK	0	180,000..	180,000.00
<b>Jumlah</b>	<b>5,025,523,925.</b>	<b>4,716,375,084.</b>	<b>309,148,841</b>

Perbandingan realisasi Belanja Pegawai di LRA dengan nilai Beban Pegawai di LO disajikan pada tabel berikut.

**Tabel D.3.1.2 Perbandingan Belanja dan Beban Pegawai Tahun 2025 di LRA dengan LO**

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Jumlah kelompok belanja 51 (pegawai)	5,056,585,000	5,025,523,925.	0
<b>Jumlah</b>	<b>5,056,585,000</b>	<b>5,025,523,925.</b>	<b>0</b>

1. Tidak terdapat selisih antara LRA dan LO Bpmsph pad akun Pegawai (51)

### D.3. Beban Persediaan

Beban Persediaan adalah pengeluaran atau biaya yang diakui ketika persediaan digunakan atau dikeluarkan untuk mendukung aktivitas operasional pemerintah. Beban ini mencerminkan nilai persediaan yang telah dikonsumsi atau dialihkan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

Nilai Beban Persediaan Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp2,652,344,165. dan Rp6,030,308,435 Nilai Beban Persediaan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp(3,377,964,270.) atau (56.016)% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Persediaan Tahun 2024.

Rincian Beban Persediaan Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel D.4.1 Beban Persediaan Tahun 2025 dan 2024**

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Persediaan	2,652,344,165.	6,030,308,435.	(3,377,964,270.)
<b>Jumlah</b>	<b>2,652,344,165.</b>	<b>6,030,308,435.</b>	<b>(3,377,964,270.)</b>

Perbandingan realisasi Belanja Barang yang menghasilkan Barang Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda di LRA dengan nilai Beban Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda di LO disajikan pada tabel berikut.

**Tabel D.4.2 Perbandingan Belanja/Beban Persediaan Tahun 2025 di LRA dengan LO**

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Beban Persediaan	3,466,783,377	2,652,344,165	814,439,212
<b>Jumlah</b>	<b>3,466,783,377</b>	<b>2,652,344,165</b>	<b>814,439,212</b>

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih realisasi Belanja Persediaan di LRA dengan nilai Beban Persediaan di LO sebesar Rp814,439,212 Perbedaan komponen antara LO dan LRA dari kode akun, LRA terdiri dari barang konsumsi, bahan baku, suku cadang dan bahan pemeliharaan sedangkan di LO barang konsumsi barang persediaan lainnya.

### D.4. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa adalah biaya yang timbul akibat pengadaan atau penggunaan barang dan jasa oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya. Barang dan jasa ini dapat berupa bahan habis pakai, peralatan, atau jasa konsultasi, konstruksi, dan layanan lainnya yang diperlukan untuk mendukung operasional pemerintah.

Nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp4,630,751,891 dan Rp3,034,337,819 Nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2025

mengalami Kenaikan sebesar Rp1,596,414,072 atau 10.86% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2024. Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel D.5.1 Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024**

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Barang dan Jasa	4,630,751,891.	3,034,337,819.	1,596,414,072
<b>Jumlah</b>	<b>4,630,751,891.</b>	<b>3,034,337,819.</b>	<b>1,596,414,072</b>

Perbandingan realisasi Belanja Barang dan Jasa di LRA dengan nilai Beban Barang dan Jasa di LO disajikan pada tabel berikut.

**Tabel D.5.1 Perbandingan Belanja/Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 di LRA dengan LO**

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Beban Barang dan Jasa	4,644,038,591.	4,630,751,891.	13,286,700
<b>Jumlah</b>	<b>4,644,038,591.</b>	<b>4,630,751,891.</b>	<b>13,286,700</b>

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih realisasi Belanja Barang dan Jasa di LRA dengan nilai Beban Barang dan Jasa di LO sebesar Rp13,286,700 merupakan Belanja Barang Non Operasional Lainnya

#### D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan adalah pengeluaran yang dilakukan untuk menjaga kondisi aset tetap atau aset lainnya agar tetap berfungsi dengan baik dan tidak mengalami penurunan kinerja. Pemeliharaan ini bersifat rutin atau berkala dan bertujuan untuk mencegah kerusakan atau memperbaiki kerusakan kecil sebelum menjadi lebih parah. Beban pemeliharaan tidak meningkatkan kapasitas atau masa manfaat aset, tetapi hanya mempertahankan kondisi aset yang ada.

Nilai Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp3,198,162,827 dan Rp2,746,777,361 Nilai Beban Pemeliharaan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp451,385,466 atau 16.433% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Pemeliharaan Tahun 2024.

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Pemeliharaan di LRA sebesar Rp665,840,202 tidak ada selisih dari nilai Beban Pemeliharaan di LO :

**Tabel D.5.1 Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dan 2024**

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Pemeliharaan	3,198,162,827.	2,746,777,361.	451,385,466.
<b>Jumlah</b>	<b>3,198,162,827.</b>	<b>2,746,777,361.</b>	<b>451,385,466.</b>

**Tabel D.5.1 Perbandingan Belanja/Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 di LRA dengan LO**

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Beban Pemeliharaan	3,198,162,827	3,198,162,827	0
<b>Jumlah</b>	<b>3,198,162,827</b>	<b>3,198,162,827</b>	<b>0</b>

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih realisasi Belanja Barang dan Jasa di LRA dengan nilai Beban Barang dan Jasa di LO sebesar Rp0 merupakan Beban Pemeliharaan ditambahkan dengan Beban persediaan untuk pemeliharaan dan beban persediaan suku cadang.

#### D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas adalah biaya yang timbul akibat pelaksanaan perjalanan dinas, yang mencakup transportasi, akomodasi, konsumsi, dan biaya lain yang terkait dengan perjalanan tersebut. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan diakui sebagai bagian dari pengeluaran pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Nilai Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp1,364,388,192 dan Rp326,947,611. Nilai Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1,037,440,581 atau 317.311% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024.

**Tabel D.5.1 Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 dan 2024**

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Perjalanan Dinas	1,364,388,192.	326,947,611.	1,037,440,581
<b>Jumlah</b>	<b>1,364,388,192.</b>	<b>326,947,611.</b>	<b>1,037,440,581</b>

**Tabel D.5.1 Perbandingan Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 di LRA dengan LO**

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Beban Perjalanan Dinas	1,364,388,192	1,364,388,192	0
<b>Jumlah</b>	<b>1,364,388,192</b>	<b>1,364,388,192</b>	<b>0</b>

Tidak ada Selisih Antara Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional Tahun 2025

#### D.7. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat adalah biaya yang timbul akibat pengadaan barang-barang yang akan diberikan secara cuma-cuma atau bersubsidi kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan program pemerintah. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan diakui sebagai bagian dari pengeluaran pemerintah untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

Nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0. dan Rp0, tahun 2024 tidak terdapat Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat.

**D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud.

Nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 2,844,500,743. dan Rp 2,886,262,141. Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp (41,761,398.) atau (1.447)% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024.

Tidak ada Selisih Antara Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional pada tahun 2025

**D.9. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih**

Pengeluaran atau biaya yang diakui oleh entitas pemerintah sebagai cadangan untuk menutupi potensi kerugian akibat piutang yang tidak dapat ditagih (piutang tak tertagih). Piutang tak tertagih adalah piutang yang diperkirakan tidak akan dapat diterima pembayarannya, baik sebagian maupun seluruhnya, karena berbagai alasan seperti debitur tidak mampu membayar atau telah terjadi wanprestasi.

Nilai Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak terdapat beban penyisihan piutang tak tertagih pada tahun 2025 dan 2024

**SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL**

Pada Tahun 2025, BPMSPH mengalami Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp (21,069,442,603.) Dan Tahun 2024 Rp (17,683,121,762.)

Nilai defisit tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp (3,386,320,841.) atau 19.15%

**KEGIATAN NON OPERASIONAL**

Kegiatan Non Operasional adalah aktivitas atau transaksi yang tidak terkait langsung dengan kegiatan utama pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik atau menjalankan program-program rutin. Kegiatan non-operasional biasanya bersifat insidental, tidak rutin, atau tidak termasuk dalam aktivitas inti pemerintah. Kegiatan ini dicatat dalam Laporan Operasional untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang kinerja keuangan pemerintah, meskipun tidak berkaitan langsung dengan operasional sehari-hari.

Rincian Kegiatan Non Operasional Kementerian Pertanian Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel D.2 Kegiatan Non Operasional Kementerian Pertanian Tahun 2025 dan 2024**

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	(31,420,713.)	23,949,097
Pendapatan Pelepasan Aset	24,065,656.	23,949,097.
Beban Pelepasan Aset	55,486,369.	0

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(22,685,625.)	80,360,011.
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>	<b>(54,106,338.)</b>	<b>104,309,108.</b>

**SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR**

Nilai Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp (31,420,713.) dan Rp23,949,097 Nilai Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp (55,369,810.) atau (231.198)% apabila dibandingkan dengan Nilai Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2024.

**SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA**

Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp (22,685,625.) dan Rp 80,360,011. Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp (103,045,636.) atau (128.23)% apabila dibandingkan dengan Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024.

**POS LUAR BIASA**

Pendapatan atau beban yang timbul dari kejadian atau transaksi yang bersifat tidak biasa (unusual) dan jarang terjadi (infrequent), serta berada di luar kegiatan operasional normal pemerintah. Pos luar biasa ini dilaporkan secara terpisah dalam Laporan Operasional untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai kejadian atau transaksi yang memiliki dampak signifikan terhadap keuangan pemerintah.

**D.10. Pendapatan Luar Biasa**

Nilai Pendapatan Luar Biasa Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Pendapatan Luar Biasa Tahun 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Pendapatan Luar Biasa Tahun 2024.

**D.11. Beban Luar Biasa**

Nilai Beban Luar Biasa Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Beban Luar Biasa Tahun 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Beban Luar Biasa Tahun 2024.

**D.12. SURPLUS/DEFISIT - LO**

Pada Tahun 2025, Kementerian Pertanian mengalami Defisit LO sebesar Rp (21,123,548,941.) Nilai defisit tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp (17,578,812,654.) atau 20.165% apabila dibandingkan dengan Defisit LO Tahun 2024 sebesar Rp (3,544,736,287.)

## **E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

### **E.1 EKUITAS AWAL**

Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp120,415,872,235 dan Rp120,415,872,235. Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp(7,766,628,567) atau 0,76% apabila dibandingkan dengan nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

### **E.2 SURPLUS/DEFISIT - LO**

Nilai Defisit – LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp(21,123,548,941) dan Rp(17,578,812,654). Nilai Defisit - LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp5,391,926,928 atau (46.71)% apabila dibandingkan dengan nilai Defisit - LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

#### **E.3.1 Koreksi atas Reklasifikasi**

Koreksi atas Reklasifikasi merupakan koreksi kesalahan pencatatan nilai reklasifikasi yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian reklasifikasi yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 disajikan sebesar Rp0 merupakan koreksi yang menambah ekuitas. Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 disajikan sebesar Rp0 merupakan koreksi yang mengurangi ekuitas. Koreksi atas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

### **E.4 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS**

Transaksi Antar Entitas merupakan transaksi atau aliran sumber daya ekonomi (seperti dana, barang, atau jasa) yang terjadi antara dua atau lebih entitas di dalam lingkup pemerintah. Transaksi ini dapat melibatkan entitas pelaporan, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau unit-unit kerja di bawahnya.

#### **E.4.1 Ekuitas Awal**

Nilai ekuitas awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp112,649,243,668 dan Rp 120,415,872,235

#### **E.4.2 SURPLUS/DEFISIT-LO**

Surplus/Defisit LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp(21,123,548,941.) dan Rp (17,578,812,654.) mengalami kenaikan sebesar Rp (3,544,736,287.) atau (20.16)% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

#### E.4.3 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Rincian Transaksi antar Entitas Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

**RINCIAN TRANSAKSI ANTAR ENTITAS TINGKAT SATKER MENURUT AKUN  
SAMPAI DENGAN DESEMBER 2025**

calk\_lpe\_akun\_satker\_poc

Akun	Uraian	2025	2024
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	24,415,046,849.	11,448,580,461.
313121	Diterima dari Entitas Lain	-2,305,502,448.	-2,162,195,797.
313211	Transfer Keluar	-21,366,432.	0.
313221	Transfer Masuk	0.	523,641,655.
<b>JUMLAH</b>		<b>22,088,177,969.</b>	<b>9,810,026,319.</b>

#### E.4.4 Ditagihkan ke Entitas Lain

Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN).

Nilai Transaksi Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 24,415,046,849. dan Rp 11,448,580,461. Nilai Transaksi Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami Kenaikan sebesar Rp 12,966,466,388 atau 46.89% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

#### E.4.5 Diterima dari Entitas Lain

Diterima dari Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas belanja pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN).

Nilai Transaksi Diterima dari Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp (2,305,502,448). dan Rp (2,162,195,797) Nilai Transaksi Diterima dari Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp (143,306,651) atau 93.78% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

#### E.4.6 Transfer Keluar

Transfer Keluar merupakan perpindahan keluar aset atau kewajiban dari satu entitas akuntansi ke entitas akuntansi lain baik di internal Kementerian Pertanian, dengan kementerian/lembaga lain, maupun dengan BUN.

Nilai Transfer Keluar untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp(21,366,432) dan Rp0 Nilai Transfer Keluar untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 terjadi hanya

antar entitas akuntansi lingkup internal Kementerian Pertanian. Nilai Transfer Keluar untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp(21,366,432) atau 100% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember2024.

#### **E.4.7 Transfer Masuk**

Transfer Masuk merupakan perpindahan masuk aset atau kewajiban dari satu entitas akuntansi ke entitas akuntansi lain baik di internal Kementerian Pertanian, dengan kementerian/lembaga lain, maupun dengan BUN.

Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp523,641,655 Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember2025 terjadi hanya antar entitas akuntansi lingkup internal Kementerian Pertanian. Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember2025 mengalami penurunan sebesar Rp0 atau 0% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember2024.

#### **E.5 KENAIKAN (PENURUNAN) EKUITAS**

Pada Tahun 2025, Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan mengalami kenaikan ekuitas sebesar Rp 1,007,577,703 Nilai Kenaikan tersebut lebih tinggi sebesar Rp(2,105,983,324.) atau (71.36)% apabila dibandingkan dengan penurunan ekuitas Tahun 2024 sebesar Rp(7,352,349,797)

#### **E.6 EKUITAS AKHIR**

Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 113,656,821,371. dan Rp 112,649,243,668. Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp 1,007,577,703 atau 0.89% apabila dibandingkan dengan nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember2024.

**F.1. Pengungkapan Capaian Rincian Output Per Fungsi APBN dan Prioritas Nasional Tahun 2025**

Pada Tahun 2025, BPMSPH memiliki Prioritas Nasional (PN) sebanyak satu PN (Bantuan Ternak Unggas)

Nilai pagu anggaran Rp4,195,800,000 dengan realisasi sebesar Rp0 atau 0% dengan RVRO 0.00 , TCPRO Sebesar 9% dan PCRO sebesar 9% dengan keterangan Bantuan Ternak Unggas dalam persiapan pengadaan Barang/Jasa.

**Kementerian/Lembaga** : Kementerian Pertanian  
**Unit Organisasi** : Peternakan dan Kesehatan Hewan  
**Satuan Kerja** : Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan  
**Fungsi** : Keamanan Produk Hewan  
**Sub Fungsi** : Pengujian Mutu Produk Hewan  
**Program** : Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas  
**Lokasi** : Jl. Pemuda No. 29A

No.	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Keterangan
		Anggaran	Ralisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	HA.1785.QEO004 Bantuan Produk dan Peralatan – Bantuan Ternak Unggas	4,195,800,000	3,941,154,954	93.93	12,600	0	Ekor	100	Kegiatan telah terselesaikan
2	HA.1786.QJA – Penyidikan dan Pengujian roduk – Hasil Uji Keamanan dan Mutu Produk Hewan	6,429,270,000	6,147,216,493	95.61	11,750	11,750	Produk	100	Kegiatan telah terselesaikan
3	HA.1787.RAG001- Sarana Kesehatan Masyarakat Veteriner	3,145,876,000	3,134,727,729	99.65	3	3	Unit	100	Kegiatan telah terselesaikan
4	WA.1787.EBA956 - Layanan Dukungan Manajemen Internal – Layanan BMN	6,130,000	581,000	9.48	4	4	Layanan	100	Kegiatan telah terselesaikan
5	WA.1787.EBA962 - Layanan Dukungan Manajemen Internal – Layanan Umum	40,040,000	14,572,320	36.39	1	1	Layanan	100	Kegiatan telah terselesaikan
6	WA.1787.EBA994 - Layanan Dukungan Manajemen Internal – Layanan Perkantoran	11,404,335,000	11,136,886,464	59.16	2	2	Layanan	100	Kegiatan telah terselesaikan
7	WA.1787.EBC954 - Layanan Manajemen SDM Internal - Layanan Manajemen SDM	13,015,000	500,000	3.84	62	62	Layanan	100	Kegiatan telah terselesaikan
8	WA.1787.EBC953 - Layanan Manajemen SDM Internal – Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3,852,000	0	0	1	1	Dokumen	100	Kegiatan telah terselesaikan

9	WA.1787.EBD955 - Layanan Manajemen Kinerja Internal – Layanan Manajemen Keuangan	15,387,000	1,361,000	8.85	12	12	Dokumen	100	Kegiatan telah terselesaik an
---	--	------------	-----------	------	----	----	---------	-----	--

### F.2. Penetapan Status Penggunaan BMN (PSP), Persetujuan BMN, dan SK Penghapusan BMN

Monitoring status Penetapan Status Penggunaan BMN (PSP) berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) Lingkup Kementerian Pertanian sudah semua ditetapkan status penggunaannya

### F.3. Pengungkapan Penting Lainnya

Terdapat pada To Do List MONSAKTI yaitu Ketidaksesuaian akun vs kode barang terjadi ketika kode akun belanja tidak sesuai dengan kode Barang Milik Negara (BMN) yang dihasilkan saat proses pencatatan, misalnya saat proses serah terima (BAST). Penyebab utamanya bisa karena kesalahan dalam memilih kode barang, perbedaan pemahaman tentang nilai kapitalisasi, atau pergantian petugas. Untuk memperbaikinya, dapat dilakukan reklasifikasi BMN jika SP2D sudah diterbitkan.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN BOGOR

#### KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE PERSEDIAAN TIDAK WAJAR

saiker : 567275

No	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	No. SP2D
1	BAST KONTRAKTUAL	B-12006/PL.030/F.5.A/11/2025	12-11-2025	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	Pengadaan Bahan Supply Center II E P-01K9C5HYW9E Q62RQ5DBR6X7T TF	1010310002	342	38,850	13,286,700	259991320662222
2	BAST NONKONTRAKTUAL	B-19011/PL.010/F.5.A/08/2025	19-08-2025	523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan instrumen Pengujian Logam Berat ICPMS	1010310002	1	14,430,000	14,430,000	259991310903742
Total								0	0	0	